



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TW II**

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya jugalah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Triwulan II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya TW II dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan Evaluasi Atas Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Triwulan II (Januari sd Juni 2025).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TW II merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang yang di monitoring dan evaluasi secara berkala.


Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TW II ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai

kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya.

Pada kesempatan ini juga, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami juga sangat berharap mendapat masukan, saran dan kritik terhadap penulisan dan isi dari laporan kinerja kami ini sehingga kedepan dapat diperbaiki dan lebih sempurna lagi.

Sungai Raya, Juni 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan


H. Elfizar Edrus, S.Sos., S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
197101141992031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	11
BAB II PERENCANAAN KERJA	
A. Renstra Perubahan 2025-2026	13
B. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kubu Raya. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 menyajikan laporan mengenai hasil hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah antara lain : Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu laporan kinerja perlu disusun dan dilaporkan secara berkala dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah per triwulan dan tahunan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025
2. Mendorong Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Susunan Organisasi

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh

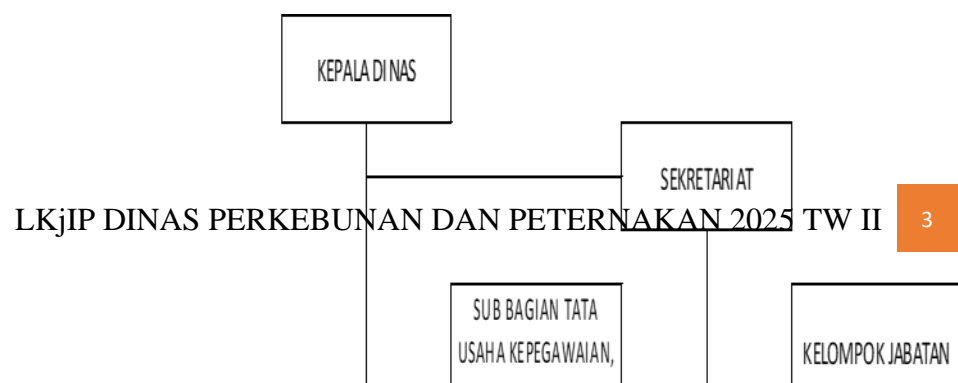
perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Seiring dengan penyederhanaan birokrasi, maka susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- c. Bidang Produksi dan Perbenihan;
- d. Bidang Prasarana dan Bina Usaha;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 1.1



3. Tupoksi

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perkebunan dan Peternakan di sub urusan perkebunan dan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
2. perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
3. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dan pelayanan umum di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Perkebunan dan Peternakan;
6. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan;
7. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perkebunan dan Peternakan dan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka fungsi yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kubu Raya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas: memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
 - d. pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan program bidang perkebunan dan peternakan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas: membantu kepala dinas dalam penyusunan rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum
 - c. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pengendalian kegiatan di Dinas;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Produksi dan Perbenihan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan penyelenggaraan tugas di bidang produksi dan perbenihan.
 4. Bidang Prasarana dan Bina Usaha mempunyai fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan tugas di bidang prasarana dan pembinaan usaha.
 5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas peternakan dan kesehatan hewan.
 6. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perlindungan dan penyuluhan.
 7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

5. Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 30 orang, Tenaga

Honorer 17 orang. Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1 Data/Kekuatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS				Jumlah	Non PNS
		Struktural					
		Pangkat/Golongan					
I	II	III	IV				
1.	S2	-		3	3	6	
2.	S1	-	-	13	4	17	12
3.	D3	-	2	1	-	3	2
4.	SLTA	-	-	4	-	4	4
Jumlah		-	2	21	7	30	18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kubu Raya Tahun 2025

Berdasar tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya berjumlah 30 (PNS) orang dan Non PNS berjumlah 18 orang. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan golongan ruang, jumlah PNS pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh pegawai dengan golongan ruang III, yaitu sebanyak 21 orang atau 70 % dari total keseluruhan PNS. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan pendidikan terdiri atas Srata-2 (S2) sebanyak 4 orang (13,33%, Srata-1 (S1) sebanyak 20 orang (66,67%), Diploma (D3) sebanyak 2 Orang (6,67) dan SLTA sebanyak 4 orang (13,33%). Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya banyak ditempati oleh Strata-1 (S1) memiliki pendidikan tinggi. Hal ini

mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki Kualifikasi Pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Kubu Raya.

Tabel. 1.2 Data/Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Eselon II b	1	-	1	
2.	Eselon III a		1	1	
3.	Eselon III b	3	1	4	
4.	Eselon IV b		1	1	
5.	Fungsional	6	8	14	
6.	Pelaksana	7	2	9	
Jumlah		17	13	30	

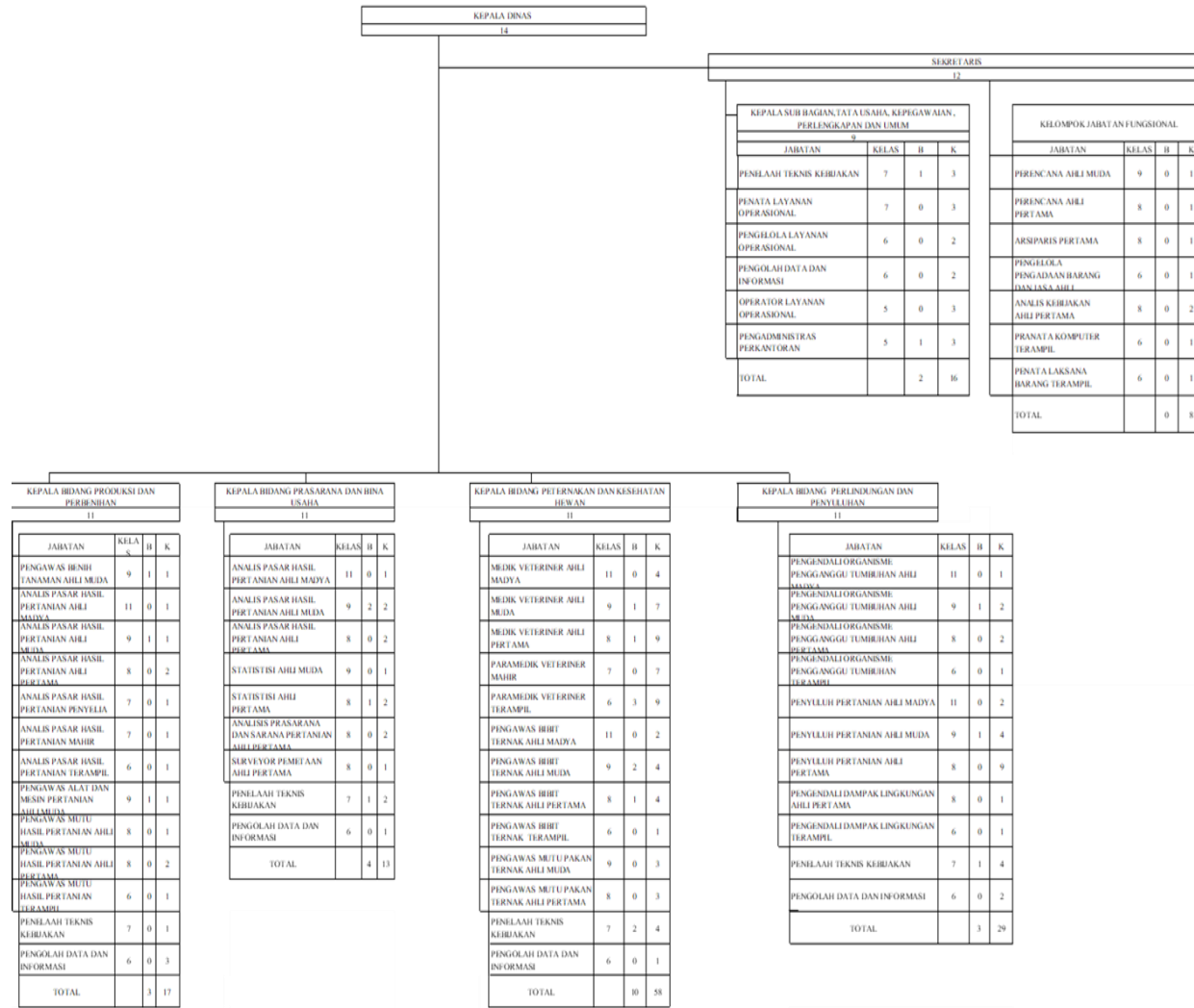
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kubu Raya Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2025 didominasi oleh pejabat Fungsional sebanyak 14 orang atau 46,67%. Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai PNS laki sebanyak 17 orang (58,62%) dan perempuan sebanyak 13 orang (43,33%). Pegawai PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Jabatan terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang (3,33%), Eselon III sebanyak 1 orang

(3,33%), Eselon IV sebanyak 1 orang (3,33%), Jabatan Fungsional tertentu sebanyak 14 orang (46,67%) dan Staf/Pelaksana sebanyak 9 Orang (30%).

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan pegawai, karena ada beberapa jabatan fungsional yang jumlahnya masih kekurangan personil dalam mendukung kinerja dan kegiatan yang akan dicapai. Kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAB, ABK dan peta jabatan dapat dilihat dibawah ini:

Bagan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ANJAB, ABK dan Peta Jabatan



Berdasar bagan diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan ANJAB, ABK pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat

- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan Penata Layanan Operasional, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan Pengelola Layanan Operasional, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengolah Data dan Informasi, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Operator Layanan Operasional, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan pengadministrasi Perkantoran, kebutuhan sebanyak 3 orang

2. Bidang Produksi dan Perbenihan

- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, kebutuhan sebanyak 1 orang

- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengolah Data dan Informasi, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 1 orang

3. Bidang Prasarana dan Bina Usaha

- Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Statistisi Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Statistisi Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang

- Jabatan Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengolah Data dan Informasi, kebutuhan sebanyak 1 orang

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Jabatan Medik Veteriner Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 4 orang
- Jabatan Medik Veteriner Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 7 orang
- Jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 9 orang
- Jabatan Paramedik Veteriner Mahir, kebutuhan sebanyak 7 orang
- Jabatan Paramedik Veteriner Terampil, kebutuhan sebanyak 9 orang
- Jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 4 orang
- Jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 4 orang
- Jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 3 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 4 orang

- Jabatan Pengolah Data dan Informasi, kebutuhan sebanyak 1 orang

5. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan

- Jabatan Pengendali organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Madya, kebutuhan sebanyak 2 orang
- Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Muda, kebutuhan sebanyak 4 orang
- Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 9 orang
- Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Terampil, kebutuhan sebanyak 1 orang
- Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kebutuhan sebanyak 4 orang
- Jabatan Pengolah Data dan Informasi, kebutuhan sebanyak 2 orang

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 7.599.761.166,11 (*Tujuh Milyar Limat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*), dengan anggaran yang dialokasikan di TW II sebesar Rp. 2. 036.311.052,00,- (*Dua Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 26,79% dari keseluruhan pagu. Realisasi sampai TW II sebesar Rp. 3.018.295.459,00 atau sebesar 39,71 % dari pagu anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Anggaran dan Realisasi Triwulan II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025 TW II	(%)
Belanja	7.599.761.166,11	3.018.295.459,00	39,71 %
Belanja Operasi	7.545.978.329,11	3.013.594.547,00	39,93 %
Belanja Pegawai	4.851.565.989,00	2.456.243.967,00	49,27 %
Belanja Barang dan Jasa	2.560.802.147,95	557.350.580,00	21,76 %
Belanja Modal	53.782.837,00	4.700.912,00	8,74 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.782.837,00	4.700.912,00	8,74 %

Sumber : LRA Dinas Perkebunan dan Peternakan Triwulan II TA 2025

Secara pelaporan keuangan, sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sejak Penganggaran. Sehingga, sejak dari Penganggaran sehingga tidak mengenal Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Perkebunan dan Peternakan belum mempunyai bangunan sendiri dan masih menempati bangunan milik Provinsi Kalimantan Barat. Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menunjang kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu 2 unit Puskesmas yaitu Puskesmas di Kecamatan Rasau Jaya dan Puskesmas di Kecamatan Sungai Kakap. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program atau kegiatan antara lain :

Tabel 1.4. Peralatan Gedung dan Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah (bh/unit)	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	A.C. Split	14	10	4	
2	Brandkas	3		3	
3	Dispenser	7	2	5	
4	Filing Cabinet Besi	12	9	3	
5	Hard Disk	6	2	4	
6	Kipas Angin	7		7	
7	Komputer Unit Lainnya	1		1	
8	Kursi Besi/Metal	28	28		
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42			
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12			
11	Kursi Putar	10	4	6	
12	Kursi Tamu	6	3	3	
13	Lain-lain (Kursi Kerja Pejabat)	11			
14	Lain-lain (Meja Kerja Pejabat)	27			
15	Lain-lain (Meja Rapat Pejabat)	2	2		
16	Lap Top	38	11	27	
17	Lemari Besi/Metal	12	12		
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4		4	
19	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	4	1	3	
20	Lemari Es	4	4		
21	Lemari Penyimpan	2	2		
22	Meja 1/2 Biro	1		1	
23	Meja Kerja Kayu	26			
24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25			

25	Mesin Absensi	3	1	2	
26	Mesin Cetak	2		2	
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1		1	
28	Note Book	5		5	
29	P.C Unit	24	7	18	
30	Papan Tulis	6	6		
31	Pesawat Telephone	1		1	
32	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	1		
33	Pompa Air	4	2	2	
34	Portable Generating Set	3	1	2	
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	11	33	
36	Rak Besi	3	3		
37	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	4	2	
Jumlah		265	126	139	

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kubu Raya Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 265 buah yang terdiri dari 126 buah (47,55%) dalam kondisi baik dan 139 buah (14,72%) dalam kondisi rusak. Berdasarkan komposisi tersebut bahwa peralatan dan perlengkapan kantor lebih banyak yang rusak.

Tabel 1.5 Sarana Mobilitas Kegiatan Operasional

No	Jenis Barang	Jumlah (bh/unit)	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Roda 4 (mobil)	1	1	-	
2.	Kendaraan Roda 2 (sepeda motor)	14	12	2	
Jumlah		15	13	2	

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa mobilitas kegiatan operasional sebanyak 15 unit (kondisi baik 86,67% dan 13,33% dalam kondisi rusak. Kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 1 unit dan kendaraan roda 2 (sepeda motor sebanyak 13 unit dalam kondisi baik

Tabel 1.6 Peralatan Pendukung Kegiatan

No	Nama Barang	Jumlah (bh/unit)	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Alat Kedokteran Gigi Lain-Lain	3	1	2	
2	Alat Laboratorium Lainnya Lain-Lain	9	1	8	
3	Basic Obstetric Set	2	2		
4	Camera Electronic	2	1	1	
5	Camera Video	1	1		
6	Cervix Dilatator	4		4	
7	Container	26	20	6	
8	Digital Video Effect	1	1		
9	Global Positioning System	10	5	5	
10	Haematology Analyzer	2	2		
11	Infusion Pump	2	1	1	
12	Insemination Gun	31	13	18	
13	Lain-Lain (Peralatan Studio Video dan Film)	1			
14	Layar Film/Projector	4	1	3	
15	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		
17	Microscope	2	2		
18	Mikroskop	5	5		

19	Sentrifuge Untuk Microplate	4	4		
20	Sepeda Motor	14	12	2	
21	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	5		5	
22	Station Wagon	1	1		
23	Sterilisator	2	1	1	
24	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	6		6	
25	Stick Pengukur Sapi	2	2		
26	Tangki Air	2	1	1	
27	Telephone Mobile	4		4	
28	Televisi	1	1		
29	Termometer Standar	1	1		
30	U S G	1		1	
	Jumlah	158	85	72	

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa Peralatan Pendukung Kegiatan sebanyak 157 unit dalam kondisi baik 85 unit (54,14%) dan kondisi rusak sebanyak 72 unit (45,86%).

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang dihadapi sebagai berikut :

Tabel 1.7. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien	Belum optimalnya capaian nilai SAKIP	Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam komposisi struktur jabatan dalam organisasi.
			Pelayanan oleh perangkat daerah belum optimal.
2	Ketahanan Ekonomi dan Pangan serta Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Produksi dan Produktivitas disektor Perkebunan dan Peternakan masih rendah	Letak kebun yang berada di pedalaman Desa, agak menyulitkan dalam proses monitoring.
			Sengketa lahan, bagi hasil perusahaan dan petani plasma, kebakaran lahan perkebunan.
			Petani pekebun yang belum mendaftarkan kebunnya terkait dengan kepemilikan lahan, alih fungsi lahan, status lahan, dan peruntukan lahan.
			Pekebun belum mampu memenuhi kebutuhan bibit unggul secara mandiri karena keterbatasan pengetahuan dan permodalan dalam upaya pendaftaran benih unggul lokal menjadi benih unggul sebar bersertifikat.
			Hanya ada satu tenaga penyuluh perkebunan untuk mendampingi atau memberikan bimbingan teknis budidaya perkebunan pada wilayah kerja se kabupaten kubu Raya.
			Kondisi wilayah yang dekat karantina hewan sehingga penyebaran penyakit hewan dari luar provinsi lebih cepat, Prasarana kesehatan hewan (Puskeswan) masih kurang, Kesadaran peternak terhadap pemeliharaan ternak, pencegahan penyakit hean menular masih rendah.

			Pelayanan Inseminasi Buatan belum optimal dan Penerapan budidaya ternak yang baik dan benar masih rendah.
			Pengorganisasian data yang masih lemah, sumber data yang tumpang tindih dengan pertanian, dan penyimpanan data yang masih by personal.
			Para pelaku usah belum memperhatikan penanganan produk pangan asal hewan yang berstandar ASUH.
		Daya dukung pemasaran dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sub sektor perkebunan dan Peternakan masih rendah	Masih kurangnya pelatihan pengolahan hasil, bantuan alat pengolahan.
			Belum menerapkan paket teknologi pengolahan hasil perkebunan dan peternakan.
			Harga jual produk perkebunan dan peternakan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Kesulitan dalam mengangkut produk hasil perkebunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENSTRA 2025-2026

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya tahun 2025–2026 merupakan dokumen perencanaan dan strategi mendasar, sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada mungkin timbul yang dibuat bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya. Perumusan rencana strategis mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/ kualitatif sampai dengan yang paling teknis/ kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan bersama agar rencana strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam implementasinya diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perkebunan

dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya saja, melainkan juga seluruh aparatur Kabupaten Kubu Raya, *stakeholder* dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibutuhkan 4 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain : (1) Pendekatan Politik, (2) Pendekatan Teknokratis, (3) Pendekatan Partisipatif, (4) Pendekatan *Top-Down* (atas-bawah) dan Pendekatan *Bottom-Up* (bawah-atas). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan satu kesatuan yang utuh dari sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan.

2.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 menyatakan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Meningkatnya daya saing daerah

2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 adalah :

1. Meningkatnya capaian nilai SAKIP
2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas disektor Perkebunan dan Peternakan

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2024)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	
										2025	2026
(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
T.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan	IT.1	Nilai SAKIP	S.1	Meningkatnya Nilai SAKIP	IS.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	BB (73,10)	BB (73,40)	BB (73,50)
		IT.2	Opini BPK	S.2	Meningkatnya Nilai SAKIP	IS.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP
T.2	Meningkatkan daya saing daerah	IT.3	Pertumbuhan PDRB	S.3	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas sub sektor perkebunan dan peternakan	IS.3	PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan	Juta Rupiah	1.388.483	1.573.851	
						IS.4	PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan	Juta Rupiah	830.176	937.576,80	
						IS.5	Produktivitas sektor pertanian sub sektor perkebunan	Ton/ha/thn	2,354	2,55	2,56
						IS.6	Produktivitas sektor pertanian sub sektor perkebunan	Ton/thn	18236	18327	18694

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja bermanfaat dalam rangka pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020 melaksanakan 7 (tujuh) program pembangunan yang meliputi 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, dan 51 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II tahun 2025 belum banyak dilaksanakan karena baru tahap persiapan. Untuk target pelaksanaan kegiatan difokuskan di Triwulan III dan IV.

Perjanjian kinerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dalam tahun 2025 yang disusun menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan menurut Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kepuasan pelayanan public	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Baik (73,4)
2	Meningkatnya sektor pertanian	- PDRB Sektor Pertanian Sub Perkebunan PDRB Sektor Pertanian Sub	1.573.851

	-	Peternakan (dalam Juta Rp)	937.576,80
Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.018.360.865,16
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		733.668,95
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		462.699.656,00
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		161.915.501,00
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		84.069.173,00
6.	Program Perizinan Usaha Pertanian		86.418.260,00
7.	Program Penyuluhan Pertanian		52.629.427,00
TOTAL			7.599.761.166,11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI*	%
1	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian Sub Perkebunan	1.573.851 Jt	2.187.831,09 Jt	139,01%
		PDRB Sektor Pertanian Sub Peternakan	937.576,80 Jt	869.072,82 Jt	92,69 %

*Data perhitungan PDRB Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, BPS Kubu Raya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB yang terkait setor Pertanian adalah PDRB yang dilakukan dengan pendekatan produksi Lapangan Usaha dan disajikan atas dasar harga berlaku pada periode perhitungan. Pada perhitungan PDRB lapangan usaha, PDRB sektor Pertanian terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, yang mencakup pertanian tanaman pangan,

tanaman hortikultura, tanaman Perkebunan dan Peternakan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang di tujukan untuk dijual.

Dalam perhitungan PDRB sektor pertanian memerlukan 4 (empat) komponen data, yaitu data produksi, data harga, data indikator harga dan data struktur biaya kegiatan. Data produksi komoditas diperoleh dari dinas yang bersangkutan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari BPS. Data indikator harga berupa Indeks harga diperoleh dari Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar, BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman Perkebunan dan Peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

Realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Kubu Raya diperoleh dari laporan tahunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha tahun 2019 s.d 2024 oleh BPS Kabupaten Kubu Raya.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN TW II			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Peningkatan PDRB Pertanian Sub Perkebunan dan Peternakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.018.360.865,16	2.701.754.792,00	44,89	100	55,11
2		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	733.668.283,95	60.215.418,00	8,21	121,72	113,51
3		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	462.699.656,00	53.293.585,00	11,52	121,72	110,20
4		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	161.915.501,00	83.914.329,00	51,83	92,69	40,86,
5		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	84.069.173,00	53.147.149,00	63,22	139,01	75,79
6		Program Perijinan Usaha Pertanian	86.418.260,00	30.700.000,00	35,52	139,01	103,49
7		Program Penyuluhan Pertanian	52.629.427,00	35.270.186,00	67,02	139,01	72,00
Jumlah			7.599.761.166,11	3.018.295.459,00	39,71	121,88	82,16

Penjelasan :

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi pada nilai rata-rata pada sasaran strategis peningkatan PDRB Pertanian yang terdiri atas PDRB Sektor Pertanian Sub Perkebunan sebesar 139,01 % dan PDRB Sektor Pertanian Sub Peternakan sebesar 92,69%.

Untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, maka tidak terfokus pada satu program. Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka dalam satu program dapat dilakukan lebih dari satu target indikator Kinerja. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, mempunyai dua target kinerja yaitu terkait PDRB Sektor Pertanian sub Perkebunan dan PDRB Sektor Peternakan. Sehingga untuk menilai tingkat efisiensi dari capaian kinerja dihitung dari penggabungan dua capaian indikator kinerja tersebut dengan nominal anggaran yang dialokasikan, didapatlah tingkat 82,16%

Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dalam KMK 050 tahun 2022, telah ditetapkan target kinerja per sub kegiatan antara lain :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kubu Raya	Persen
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kubu Raya	12 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kubu Raya	3 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kubu Raya	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Kubu Raya	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Kubu Raya	5 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kubu Raya	12 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kubu Raya	33 Orang/Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Kab.Kubu Raya	2 Laporan

Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat /Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kubu Raya	15 Dokumen
Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kubu Raya	2 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kubu Raya	1 Dokumen
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kubu Raya	5 Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kubu Raya	7 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Kab.Kubu Raya	33 Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kubu Raya	200 Orang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kubu Raya	5 Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kubu Raya	12 Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	1 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	1 Paket

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	1 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	1 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	365 Dokumen
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kubu Raya	108 Laporan
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD (website)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab.Kubu Raya	8 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	4 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	4 Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kubu Raya	48Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	36 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kubu Raya	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang	Kab.Kubu Raya	50 Unit

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	urusan pemerintah daerah yang dipelihara		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kubu Raya	1 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kubu Raya	12 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Kubu Raya	35 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kubu Raya	2 Unit
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Kebun	Kab.Kubu Raya	2,55 Ton/ha/thn
	Produktivitas Hewan	Kab. Kubu Raya	18.327 Ton/thn
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana perkebunan	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab.Kubu Raya	1 Dokumen
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab.Kubu Raya	1 Dokumen

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kab.Kubu Raya	1 Varietas Unggul Baru (VUB)
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Kab.Kubu Raya	8 Laporan
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab.Kubu Raya	8 laporan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kab.Kubu Raya	20 ekor
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Daya dukung prasarana perkebunan terhadap produktivitas kebun	Kab.Kubu Raya	0,25 %
	Daya dukung prasarana peternakan terhadap produktivitas ternak	Kab.Kubu Raya	1%
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab.Kubu Raya	3 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab.Kubu Raya	2 Laporan

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab.Kubu Raya	2 Unit
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kubu Raya	5 laporan
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kab.Kubu Raya	5 laporan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	Kab.Kubu Raya	100 Persen
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan jenis penyakit hewan yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	Kab.Kubu Raya	6 laporan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab.Kubu Raya	6 laporan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sample dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Kab.Kubu Raya	5 laporan
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab.Kubu Raya	5 laporan
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab.Kubu Raya	15 Laporan

Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Kab.Kubu Raya	30 Unit Usaha
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan perkebunan	Kab.Kubu Raya	77 Persen
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana perkebunan Kabupaten	Kab.Kubu Raya	1 laporan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab.Kubu Raya	150 hektar
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab.Kubu Raya	50.000 hektar
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perkebunan terdaftar	Kab.Kubu Raya	71 persen
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pertimbangan teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab.Kubu Raya	2 Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab.Kubu Raya	2 Laporan

Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Perkebunan yang dibina	Kab.Kubu Raya	2,07 persen
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani pekebun terbina	Kab.Kubu Raya	1 Laporan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Kubu Raya	1 Unit

Secara umum dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan angka realisasi masih menggunakan angkat realisasi tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh BPS Prov Kalimantan Barat. Sehingga belum dapat menggambarkan kondisi pencapaian target sesungguhnya. Selain itu, data yang dikeluarkan terutama sektor Perkebunan merupakan rata-rata dari produksi tiga tahun sebelumnya. Mengingat sektor ini bersifat produksi tahunan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum realisasi anggaran pada tahun 2025 Triwulan II mencapai 39,71 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar menggunakan PDRB sub Perkebunan 139,01 % dan PDRB sub Peternakan 92,69%. Rendahnya realisasi pada TW II TA 2025 dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada TW II merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas sedangkan puncak pelaksanaan kegiatan berada di TW III dan TW IV.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Sumber Daya Manusia di bidang Perkebunan dan Peternakan yang belum memadai;
2. Pendanaan yang terbatas;
3. Data masih belum terintegrasi dengan baik;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Memanfaatkan SDM yang ada;
2. Memanfaatkan pendanaan melalui APBD I, APBD II dan APBN;
3. Menyusun Database Perkebunan dan Peternakan
4. Peningkatan produksi sektor Perkebunan dan Peternakan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel Realisasi Anggaran Disbunnak TW II TA 2025

Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Pagu 2024	Pagu Per TW II	Realisasi Per TW II	Realisasi Keseluruhan (Jan-Juni)	% Realisasi TW II	% Realisasi Keseluruhan vs Pagu 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.864.464.243,00	1.711.851.629,00	1.389.581.389,00	2.737.020.995,00	81,17	23,69
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.573.624,00	13.348.000,00	-	-	-	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.997.344,00	2.959.000	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.996.960,00	2.905.000,00	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD	3.999.664,00	2.809.000,00	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.256,00	4.675.000,00	-	-	-	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.580.400,00	-	-	-	-	0,00

Admisnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.850.755.866,00	1.400.914.546,00	1.172.054.432,00	2.442.303.395,00	83,66	24,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.849.320.989,00	1.400.914.546,00	1.172.054.432,00	2.442.303.395,00	83,66	24,17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	431.264,00	-	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.003.613,00	-	-	-	-	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.816.800,00	-	-	-	0,00	0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	259.000,00		-		0,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.652.800,00	-	-	-	0,00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	3.905.000,00	3.646.000,00	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.198.881,00	2.563.100,00	-	-	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.198.881,00	2.563.100,00	-	-	0,00	0,00

Bimbingan Teknis beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.380.429,00	55.498.983,00	13.679.006,00	13.679.006,00	24,65	3,74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.987.289,00	-	-	-	#DIV/0!	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.994.211,00	-	-	-	#DIV/0!	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.410.418,00	13.749.363,00	13.679.006,00	13.679.006,00	99,49	9,22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.580.511,00	1.749.620,00	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturn Perundang-undangan	4.992.000,00	-	-	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.416.000,00	40.000.000	-	-	0,00	0,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.178.223,00	127.294.303,00	109.261.527,00	109.261.527,00	85,83	84,58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.294.303,00	127.294.303,00	109.261.527,00	109.261.527,00	85,83	85,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.883.920,00	1.883.920,00	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.720.330,00	87.372.997,00	77.515.946,00	154.706.589,00	88,72	25,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.104.896,00	19.872.474,00	12.015.946,00	24.106.589,00	60,47	16,21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.615.434,00	67.500.523,00	65.500.000,00	130.600.000,00	97,04	29,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.840.090,00	24.859.700,00	17.070.478,00	17.070.478,00	68,67	26,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.410.390,00	10.800.000,00	9.770.478,00	9.770.478,00	90,47	28,39

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000,00	7.580.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	96,31	30,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.479.700,00	6.479.700,00	-	-	0,00	0,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.604.298.113,00	442.145.768,00	439.145.768,00	465.545.768,00	99,32	27,37
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	437.563.744,00	-	-	-	0,00	0,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	437.563.744,00	-	-	-	0,00	0,00
Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	347.096.873,00	64.295.768,00	62.295.768,00	76.695.768,00	96,89	17,95
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	47.895.768,00	47.895.768,00	47.895.768,00	47.895.768,00	100,00	100,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	19.802.024,00	-	-	-	0,00	0,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	230.942.393,00	16.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	87,80	6,24
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	48.456.688,00	-	-	-	-	-

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.399.560,00	8.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	87,80	14,58
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	49.399.560,00	8.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	87,80	14,58
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	770.237.936,00	369.650.000,00	369.650.000,00	374.450.000,00	100,00	47,99
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	374.450.000,00	369.650.000,00	369.650.000,00	374.450.000,00	100,00	98,72
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	395.787.936,00	-	-			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.770.845.709,00	645.549.867,00	456.516.161,00	478.116.161,00	70,72	6,74
Pengembangan Prasarana Pertanian	5.918.725.674,00	637.349.867,00	449.316.161,00	461.316.161,00	70,50	7,59
Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	1.583.920.025,00	549.645.772,00	412.735.178,00	412.735.178,00	75,09	26,06
Penyusunan Masterplan pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	4.249.456.649,00	41.810.383,00	22.180.983,00	22.180.983		

Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	82.949.000,00	45.893.712,00	14.400.000,00	24.000.000,00		
Pembangunan Prasarana Pertanian	804.800.083,00	-	-	4.800.000,00	0,00	0,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	804.800.083,00	-	-	4.800.000,00	0,00	0,00
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	47.319.952,00	8.200.000,00	7.200.000,00	12.000.000,00	87,80	15,22
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	47.319.952,00	8.200.000,00	7.200.000,00	12.000.000,00	87,80	15,22
Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	518.938.144,00	91.175.000,00	86.740.000,00	98.540.000,00	95,14	16,71
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	42.475.000,00	8.200.000,00	7.200.000,00	12.000.000,00	87,80	16,95
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.475.000,00	8.200.000,00	7.200.000,00	12.000.000,00	87,80	16,95

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.150.000,00	75.075.000,00	72.640.000,00	72.640.000,00	-	19,06
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	381.150.000,00	75.075.000,00	72.640.000,00	72.640.000,00	-	19,06
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	95.313.144,00	7.900.000,00	6.900.000,00	13.900.000,00	87,34	7,24
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	0,00	0,00
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	92.913.144,00	7.900.000,00	6.900.000,00	11.500.000,00	87,34	7,43
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	170.697.854,00	8.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	87,80	4,22
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	88.397.686,00	8.200.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00	87,80	8,15
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	82.300.168,00	-	-	-	#DIV/0!	0,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	160.604.117,00	45.345.360,00	14.400.000,00	26.400.000,00	31,76	8,97

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.604.117,00	45.345.360,00	14.400.000,00	26.400.000,00	31,76	8,97
Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	109.089.800,00	34.500.000,00	14.400.000,00	26.400.000,00	41,74	13,20
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	51.514.317,00	10.845.360,00	-	-	0,00	0,00
Program Penyuluhan Pertanian	340.983.405,00	8.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00	29,27	0,70
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	340.983.405,00	8.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00	29,27	0,70
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	340.983.405,00	8.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000	29,27	0,70
Jumlah	15.430.831.585,00	2.952.467.624,00	2.395.983.318,00	3.829.622.924,00	81,15	15,53

Berdasarkan Tabel diatas bahwa anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebesar Rp. 7.599.761.166,11 dengan realisasi per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 3.018.295.459 atau sebesar 39,72 %. Penyerapan anggaran masih cukup rendah, hal ini karena kegiatan yang dilaksanakan pada TW II merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas. bersifat rutinitas yaitu pembayaran gaji, operasional kantor dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan puncak pelaksanaan kegiatan berada di TW III dan TW IV. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berada di TW III untuk persiapan dan TW IV untuk pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja, antara lain : Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

A. KESIMPULAN

Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 Triwulan II dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan penetapan kinerja yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 menyajikan capaian kinerja dari sasaran strategis organisasi, yang tercermin dari capaian indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2025. Adapun Indikator Kinerja Utama TA 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kubu

Raya adalah PDRB Sektor Pertanian Sub Perkebunan dengan target sebesar 1.573.851,00 Jt dan PDRB Sektor Pertanian Sub Perkebunan Sub Peternakan dengan target sebesar 937.576,80 Jt. PDRB merupakan hasil yang secara rutin resmi dikeluarkan oleh BPS. Sehingga, untuk penilaian kinerja per triwulan belum bisa secara riil ditunjukkan. Hal lainnya adalah sifat dari perkebunan yang bersifat tahunan, sehingga baik perencanaan maupun output kinerja baru dapat dirasakan dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun.

Dari sisi keuangan, secara umum realisasi anggaran pada tahun 2025 Triwulan II yang berakhir Bulan Juni, realisasi baru mencapai 39,71%. Hasil pencapaian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan program pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya fokuskan pada kegiatan yang bersifat rutinitas yaitu pembayaran gaji, operasional kantor dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan puncak pelaksanaan kegiatan berada di TW III dan TW IV. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berada di TW III untuk persiapan dan TW IV untuk pelaksanaan.


Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. SARAN

Melihat masih terdapatnya kendala dalam pencapaian kinerja maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, dimasa yang akan datang memerlukan beberapa rumusan sebagai upaya perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja dan pembangunan serta pelayanan dalam sektor Dinas Perkebunan dan Peternakan terhadap masyarakat. Rumusan tersebut dapat berupa:

1. Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan teknis.
2. Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja pada unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
3. Optimalisasi peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Membangun komitmen yang terkoordinir dan konsisten di tingkat pusat dalam rangka mendukung kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya yang lebih maksimal.
5. Meningkatkan peran Data dalam setiap kebijakan dengan mengoptimalkan integrasi Data secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi.
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kinerja baik yang telah dilakukan, dalam proses maupun yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Sungai Raya, Juni 2025
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan


H. Elfizar Edrus, S.Sos., SP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
197101141992031006